

PERAN GEREJA DALAM MENANGGAPI KEMISKINAN

Victor Latumahina*

IAKN Ambon

Diterima: 28 Januari 2021; Disetujui: 28 April 2021; Dipublikasikan: 30 April 2021

Abstrak

Peran gereja di tengah kemiskinan menjadi pokok persoalan yang penting untuk dibahas karena masalah kemiskinan bukan hanya menjadi masalah lokal, namun menjadi masalah yang digumulkan oleh gereja secara luas. Tujuan dari penelitian ini agar gereja sebagai mandataris Tuhan di tengah dunia dapat berperan dalam membantu masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, serta meminjam pemikiran Karl Marx. Panggilan gereja yang seharusnya adalah untuk menyuarkan ketidakadilan dan penindasan hak-hak orang miskin. Gereja hadir untuk berpihak kepada yang lemah, tidak berdaya, miskin, dan yang terpinggirkan. Gereja perlu terus menerus menyuarkan kritik profetisnya tanpa pandang bulu terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya ketidakadilan, terampasnya hak-hak masyarakat, dan terhadap sistim yang menindas serta memiskinkan manusia. Spiritualitas dan religiusitas jemaat juga harus sampai kepada sebuah kesalehan sosial, dimana energi spiritual yang dimiliki jemaat mampu untuk mendorong kepeduliannya akan berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Salib harus dipahami sebagai refleksi atas penderitaan kematian Kristus, namun disaat yang sama pula harus mampu membuka mata dan telinga akan penderitaan, kesengsaraan, dan pengharapan manusia akan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Kata Kunci: Gereja, Kemiskinan, Kristus

Abstract

The role of the church in the midst of poverty is an important issue to discuss because the problem of poverty is not only a local problem, but is a problem that the church is grappling with at large. The purpose of this research is that the church as God's mandate in the world can play a role in helping poverty problems. This study uses a qualitative descriptive analysis method, and borrows the thoughts of Karl Marx. The church's calling should be to voice the injustice and oppression of the rights of the poor. The church exists to side with the weak, powerless, poor, and the marginalized. The church needs to continuously voice its prophetic criticism indiscriminately against various abuses of power, the occurrence of injustice, the deprivation of people's rights, and against systems that oppress and impoverish humans. The spirituality and religiosity of the congregation must also come to a social piety, where the spiritual energy possessed by the congregation is able to encourage its concern for various problems of community life. The cross must be understood as a reflection of the suffering and death of Christ, but at the same time it must be able to open eyes and ears to human suffering, misery, and hope for one's dignity as a human being.

Keywords: Church, Poverty, Christ

How to Cite: Victor Latumahina (2021). Peran Gereja Dalam Menanggapi Kemiskinan. 6 (1): 29-36.

*Corresponding author:
E-mail: faucaultengelberd@gmail.com

ISSN 2355-1704 (Print)
ISSN 2746-8615 (Online)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, khususnya bulan Oktober 2005 yang diikuti oleh inflasi tinggi, diperkirakan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Konflik sosial (Aceh, Maluku, Maluku Utara, Poso, Papua), bencana alam seperti *tsunami* (Aceh, Pulau Buru, Pangandaran), gempa bumi (Timika, Yogyakarta), lum-pur panas (Sidoarjo), banjir dan kekeringan diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya bantuan langsung tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial. Mengapa? Untuk itu perlu menjawab empat hal: (1) Apakah kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya, (2) Mengapa mereka miskin? (3) Apakah ada alternatif kebijakan menanggulangi kemiskinan?, dan (3) Sejauh manakah kearifan lokal memberi kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan? Ukuran kemiskinan sangatlah kompleks.

Ukuran kuantitatif kelihatannya lebih banyak digunakan oleh pembuat kebijakan, seperti jumlah pemilikan barang, jumlah kalori yang dikonsumsi atau tingkat pendapatan perkapita per bulan. Sayogyo (1978) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga (bukan per kapita) setara beras. Alasannya karena beras merupakan komoditas strategis, makanan pokok dan kemungkinan dijadikan menentukan standar upah (gaji) minimum. Oleh karena itu perubahan harga beras di-asumsikan akan diikuti perubahan harga barang kebutuhan pokok lain. BPS dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan bahwa mereka yang miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras) dan non pangan.

Ukuran-ukuran kuantitatif ini dalam prakteknya sangatlah kaku ketika diterapkan kepada kelompok masyarakat yang makanan pokoknya non beras (singkong, ubi-ubian, jagung dan sagu). Kelompok masyarakat yang mengkonsumsi pangan non beras ini seolah-olah menjadi kelompok inferior, primitif dan miskin hanya karena tidak mengkonsumsi beras. Cara berpikir inilah yang memosisikan komoditi beras sebagai komoditi politik yang penanganannya semakin rumit dan kompleks karena elastisitas permintaannya makin tidak elastis. Masalah kemiskinan seolah-olah hanya dapat diselesaikan dengan distribusi komoditi beras seperti program beras miskin (Raskin).

Kakunya alur berpikir ini mengakibatkan masalah kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Provinsi Papua pada tahun 2005 ditangani dengan cara mendistribusikan beras karena mengangkut ubi-ubian tidak praktis menggunakan transportasi udara. Ukuran kemiskinan akan barang modal juga bias ketika diterapkan kepada kepemilikan aset modal secara komunal, misalnya lahan usaha pertanian dimiliki oleh

kelompok kekerabatan (*clan*) yang tidak mengakui hak pemilikan perorangan. Hal ini banyak dijumpai pada sebagian besar masyarakat di bagian timur Indonesia khususnya di Maluku.

Konsep kuantitatif bisa menimbulkan dua hal yaitu : pertama, semakin menambah jumlah angka kemiskinan karena semua orang mau dengan gratis menerima bantuan pemerintah. Kedua, kelompok yang benar-benar miskin tidak tercatat karena tidak dapat dikuantifikasikan. Misalnya, mereka yang hidup di tempat kumuh, pengamen, anak jalanan, di kolong jembatan, pengemis dan pemulung di perkotaan. Ada juga banyak masyarakat terisolir di pedesaan yang tidak terjangkau oleh pencatat data kemiskinan. Konsideri ini menghadapkan pemerintah pada masalah sosial yang makin rumit. Pembangunan menjadi terhambat karena penyajian data sosial yang selalu tidak akurat.

Metode

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2013, p. 64), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jenis metode ini digunakan untuk menyajikan data secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan literasi terhadap peran gereja di dalam kemiskinan. Obyek kajian dalam penelitian ini meliputi peran gereja dalam masyarakat, khususnya dalam fungsinya kiprahnya memberikan sumbangsih di dalam bidang ekonomi masyarakat. Tugas dan panggilan gereja akan ditelusuri dalam kajian literatur dan akan berkaitan dengan teori sosial khususnya pemikiran Karl Marx, terkait dengan fakta sosial yang terjadi di tataran praksis. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, untuk selanjutnya disajikan dalam sebuah uraian sebagai alternatif solusi pengembangan gereja, dalam kerangka menjawab kebutuhan jemaat secara konkret.

PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Masalah Kemiskinan

Masalah kemiskinan seringkali diangkat untuk dijadikan suatu topik bahasan yang menarik dalam seminar-seminar, baik pada tingkat lokal maupun internasional. Hal ini disebabkan karena kemiskinan bukanlah suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa, melainkan sudah merupakan permasalahan global. Darmawijaya (1991, p.5) dalam bukunya yang berjudul Keterlibatan Allah Terhadap Kaum Miskin menyatakan bahwa, kemiskinan sebenarnya bukan suatu masalah yang baru, karena sekitar satu abad yang lalu telah didiskusikan dan berbagai kebijaksanaan telah ditempuh untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Pada zaman sekarang ini masalah kemiskinan bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh negara dunia ketiga atau hanya kelompok utara-selatan, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Dunia sudah merasakan dampak dari kemiskinan, sehingga banyak orang di berbagai negara berusaha mencari cara guna menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada dasarnya, orang yang dikatakan miskin adalah orang yang serba berkekurangan dalam hidupnya, tidak berharta dan biasa tinggal dan hidup di dalam lingkungan yang kumuh (Widyatmadja, 2010). Seorang tokoh Theologia Pembebasan dari Peru yang bernama Gustavo Gutierrez menyebut kemiskinan sebagai suatu "*estado escandaloso*" atau keadaan tidak terhormat (Yewanggoe, 1992, p. 209). Keadaan orang miskin pada umumnya tidak terhormat dan jauh dari

kehidupan khalayak ramai pada umumnya, dan seringkali orang lain enggan bila berkunjung atau bertamu di rumahnya, dikarenakan kondisi lingkungan dan pemukiman yang kumuh tersebut.

Masalah-masalah Kemiskinan

Kemiskinan Dilihat Secara Subjektif. Dengan menggunakan secara subjektif maka secara kiat bisa memahami seberapa jauh tingkat pemahaman terhadap orang miskin itu sendiri, karena pendekatan subjektif menilai berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa menurut masyarakat pada lokasi kajian.

1. Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Primer, Sekunder, Bahkan Tersier (Lux)

Dunia semakin maju, dimana perubahan zaman sehingga teknologi semakin ber-kembang bahkan pada berbagai plosok kota berbagai jenis teknologi yang dari fisik sampai pada bentuk yang dapat diakses. Hal yang tidak asing dikenal lagi pada masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang kurang serta yang mampu seperti TV, Parabola, Hp bahkan kendaraan bermotor dan lainnya membuat mereka telah mendefinisikan miskin buka saja tidak mencukupi sandang, pangan, papan, akan tetapi kepemilikan barang-barang modern yang menjadi ukuran akan kesejahteraan hidup buat mereka ini memang rasional dan relevan dengan konsep bahwa kebutuhan manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah diperoleh. Selain itu, terlihat bahwa defenisi tersebut muncul dikarenakan adanya ketimpangan barang-barang modern oleh sebagian masyarakat sehingga masyarakat yang lain mersa posisi ekonomi mereka jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat yang memiliki barang-barang modern.

2. Memiliki Tingkat Pendidikan Rendah

Reliatis perubahan dengan adanya zaman yang sangat maju dimana perubahan zaman dari sisi kehidupan sangat cepat dalam setiap ruang lingkup kehidupan membuat masyarakat kota dan sekitar harus lebih belajar serta memiliki daya saing yang handal kemudian memiliki kualitas, namun terlihat bahwa pada lokasi kajian cukup tertinggal dengan perkembangan zaman seperti kata sebuah pepatah "berubahlah sebelum perubahan itu datang." Sehingga pendidikan adalah awal untuk menjawab tantangan zaman, persepsi kemiskinan disini menurut sebagian rumah tangga yakni tingkat pendidikan juga berpengaruh, dimana persepsi yang baru yakni kemiskinan sangat erat dengan kebodohan.

3. Penghasilan Tidak Tetap

Pekerjaan juga menentuka seberapa jauh tingkat pendapatan seseorang, tetapi hal ini juga apabila pekerjaan tidak tetap menjadi ancaman tersendiri. Pekerjaan seperti bertani, ojek, tukang (kurangnya) pesanan dalam pekerjaan sebagai tukang karena masih menggunakan alat-alat tradisional, sehingga proses juga lama apalagi di zaman sekarang dimana masyarakat butuh cepat. Belum lagi kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim, yang membuat pendapatan tidak menentu, sehingga defenisi miskin diartikan sebagai keadaan apabila seseorang mempunyai penghasilan tetap.

4. Tidak Dapat Menyekolahkan Anak

Pada dasarnya definisi ini lebih bersifat dampak dari adanya kemiskinan (lemahnya finansial) yang dialami oleh rumah tangga, sehingga tidak dapat

menyekolahkan anak. Maksud dari defenisi terlihat sangat klasik dan sederhana, akan tetapi menurut sebagian rumah tangga miskin yang memang sudah cukup paham dan melihat pendidikan sebagai kebutuhan yang cukup dasar pada zaman sekarang ini, sehingga memicu kepala rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya dengan asumsi bahwa kalau orang tua sudah seperti ini, maka nasib anak juga jangan seperti orang tua. Hal ini juga mendefinisikan hal tersebut sebagai suatu indikator miskin

Faktor-Faktor Utama Terjadinya Kemiskinan

Karena kemiskinan merupakan multidimensional sehingga menimbulkan ketidak-pastian yang paling menonjol dalam menjelaskan konsep kemiskinan, sebenarnya bukan terletak pada penetapan ukuran kemiskinan itu sendiri dan bukan pada indikator kuantitatif kemiskinan, melainkan pada faktor-faktor penyebab suatu rumah tangga menjadi miskin, dalam upaya menjawab pertanyaan ini, maka peneliti akan mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebab utama terjadi kemiskinan pada suatu rumah tangga pada Dusun Kranjang Desa Waiyame dan Desa Waiheru. Dalam hal ini, kita tahu bersama bahwa setiap daerah mempunyai faktor penyebab kemiskinan berbeda-beda satu sama lain. Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan yang ditemukan pada rumah tangga yang tergolong miskin antara lain.

1. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan

Lapangan kerja terbatas mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga tidak banyak dilakukan, pada daerah pegunungan masih bisa menguntungkan karena masih ada lahan bisa dikelola tetapi pada daerah dekat dengan pusat kota mereka harus berpacu dengan perkembangan zaman apalagi dihadapkan dengan program daerah pemukiman.

Pada daerah pegunungan masyarakat lebih bertindak dengan cepat merespon diri dan mengantisipasi perubahan sosial yang begitu cepat. Hal ini apalagi dibarengi dengan tingkat pengetahuan dalam mengelola usaha minim (pendidikannya).

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Akibat dari lemahnya tingkat pendidikan yang dialami oleh kepala keluarga pada lokasi penelitian maka berpengaruh pula pada kondisi kemiskinan rumah tangga, diketahui bahwa tidak jarang akibat lemahnya pendidikan maka kepala rumah tangga kurang memiliki manajemen usaha apalagi bagi mereka yang mengusahakan kios.

Hal tersebut mempengaruhi aliran modal maupun keuntungan usaha yang sangat kurang dicermati secara baik, misalnya tidak dilakukannya pembukuan karena kurangnya pemahaman dalam hal manajemen keuangan. Apabila hal tersebut dibiarkan tersu menerus maka ke depan usaha mereka tidak akan berkembang, sehingga faktor pendidikan pun mempengaruhi pendapatan dari usaha tersebut. Akibat kurangnya pemahaman ini maka strategi keluarga untuk menambah pendapatan hanya bertumpu pada tanaman-tanaman umur panjang seperti kakao dan kelapa. Tidak di pungkiri apabila pendapatan dari kelapa dan kakao menurun akibat produktivitas rendah, maka sebagian responden dengan pemahaman usahatani yang masih kurang tidak akan berdaya melirik usahatani lain (usaha sayuran) untuk dijadikan sumber pendapatan baru.

Teologi Sosial Sebagai Teologi Kontekstual

Di kalangan umat Kristen Protestan di Indonesia, istilah teologi sosial belum jamak digunakan dalam percakapan akademik maupun public. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Julianus Mojau, istilah teologi sosial mulai sering digunakan ketika

wacana *civil society* menjadi trending topic di kalangan umat Kristen Protestan di Indonesia sekitar tahun 2000.

Walau demikian, secara substansi, teologi sosial sesungguhnya sudah terkandung dalam dokumen resmi gereja dan lembaga-lembaga di kalangan umat Kristen Protestan. Hal ini nampak dalam dokumen resmi, dan tulisan-tulisan teologis perorangan yang merupakan respons umat Kristen Protestan di Indonesia terhadap dinamika kondisi sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Dalam kajian historinya tentang keterlibatan Kekristenan Barat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan sosial, Nicholas Placido mengemukakan bahwa keterlibatan itu sangat melekat pada tradisi kekristenan Yahudi, sebagaimana yang diungkap-kan dalam narasi Perjanjian Lama tentang kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia.

Sehingga dengan demikian, teologi sosial selalu berpangkal pada pengalaman dan masalah manusia di tengah konteks kemasyarakatan yang nyata dengan berbagai segi kehidupannya, menuju penghayatan Injil yang lebih mendalam dalam situasi-situasi tersebut. Maka teologi sosial di satu pihak dapat disebut sebagai teologi kontekstual, dan juga teologi khusus tentang keterlibatan umat beriman dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Bagaimana pemikiran teologis dan praksis gereja-gereja di Indonesia dalam menanggapi persoalan kemiskinan dalam masyarakat? Menjawab pertanyaan ini kita perlu untuk menelisik bagaimana keterlibatan gereja-gereja dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang mendera bangsa Indonesia dari masa kolonial hingga masa sekarang ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa pada masa kolonial kekristenan merupakan agama yang diperkenalkan atau disyiarkan oleh bangsa-bangsa barat (Belanda dan Portugis) yang juga menghadirkan masa-masa kelam penjajahan bagi bangsa Indonesia. Akibatnya kekristenan (Protestan dan Katolik) di Indonesia cukup lama, bahkan mungkin hingga saat ini, masih sukar persepsi sebagai agama asing, agama yang tidak nasionalis, atau agama warisan dari bangsa penjajah. Ini bagi gereja-gereja di Indonesia. Persepsi ini telah memosisikan kekristenan sebagai agama yang tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa kolonial bangsa barat.

Umat Kristen di Indonesia tidak sependapat bila kekristenan diidentikkan dengan kolonialisme atau imperialisme. Sama seperti umat muslim yang tidak akan sependapat bila Islam diidentikkan dengan terorisme. Meskipun demikian umat Kristen di Indonesia tidak menyangkal bahwa kekristenan dan kolonialisme hadir di Indonesia secara bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa penjajah yang mayoritas rakyatnya beragama nasrani. Itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat ditiadakan. Namun menyamakan Injil yang disaksikan atau diberitakan oleh paramisionaris bangsa Barat pada masa penjajahan dengan kolonialisme adalah suatu cara pandang yang sangat menyesatkan.

Karena sejak dari awal keberadaan VOC di Indonesia adalah untuk kepentingan perdagangan bukan untuk penyebaran Injil. Sehingga tidaklah mengherankan bila terkadang VOC mengambil kebijakan-kebijakan yang bertolakbelakang dengan harapan dari gereja-gereja atau lembaga-lembaga misi yang melaksanakan aktivitas misi di Indonesia.

Peran Gereja dalam Menghadapi Kemiskinan

Gereja tidak bisa melepaskan diri dari persoalan kemiskinan yang sedang dihadapi. Justru pang-gilan gereja adalah terlibat secara aktif dalam memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Orang miskin berarti orang yang berkekurangan, tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya, dan orang yang lemah.

Orang miskin ada karena ketidakadilan yang harus mereka terima akibat kejahatan penguasa atau orang-orang yang memiliki kuasa, dan yang merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki. Inilah pemiskinan. Tugas dan panggilan gereja yang seharusnya adalah untuk menyuarkan ketidakadilan dan penindasan hak-hak orang miskin.

Gereja hadir untuk berpihak kepada yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jika gereja tidak memiliki keperpihkan kepada yang lemah, maka kehadiran gereja tidak memiliki makna. Kemiskinan harus ditanggulangi supaya manusia mendapatkan keadilan, harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Apabila melihat keadaan Indonesia sekarang ini, masalah sosial begitu mendominasi kehidupan sebagian besar masyarakat. Kemiskinan, pemiskinan, ketidakadilan, aniaya, pemaksaan kehendak, pelecehan, manipulasi hukum dan begitu banyak kejahatan terjadi di negara ini. Di tengah realitas sosial semacam ini, gereja perlu terlibat untuk mengurai-kan berbagai masalah tersebut hingga menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Jika melihat dari kitab Yeremia 29:7 yang berisi "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu," maka dapat dipahami bahwa gereja mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan umat manusia di bangsa ini. Nabi Yeremia memerintahkan umat Allah di Babel agar melaksanakan misi sosial bagi kesejahteraan manusia yang ada di Babel. Dewasa ini pun, gereja perlu memahami contoh kisah Yeremia ini untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan di zaman ini. Gereja diperintahkan untuk dapat mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (dalam konteks Indonesia), agar rakyat miskin dapat menikmati kehidupan terbaik seperti yang orang lain dapatkan. Bila semua orang mengalami kesejahteraan, maka dapat diasumsikan kehidupan gereja pun akan mengalami kesejahteraan. Pada bagian lain, Alkitab dengan jelas memberi contoh teladan dari Yesus sendiri yang termak-tub dalam Lukas 4:18, 19.

Adapun identifikasi dari ayat ini adalah: 1) Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; 2) Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan; 3) Memberi penglihatan kepada orang buta; 4) Membebaskan orang-orang yang tertindas; 5) Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang.

Rumusan di atas menggambarkan teladan apa yang dilakukan Yesus di tengah dunianya. Empat dari lima rumusan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang banyak disebut orang sebagai hal duniawi, hanya pada bagian akhir Yesus menyatakan hal pembebasan atas dosa yang menyeluruh.

Yesus telah memberikan teladan kepada umat-Nya untuk melakukannya misi pembebasan yang komprehensif secara holistik. Oleh sebab itu, gereja harus melakukan misinya sesuai dengan misi yang Yesus ajarkan untuk membawa pembebasan kepada umat manusia secara holistik. Gereja harus mendorong jemaat-jemaatnya dandiajar supaya memiliki kepedulian dan kesetiakawanan terhadap orang-orang miskin.

Upaya ini bisa dilakukan dengan memberdayakan jemaat untuk saling membantudan memperhatikan keadaan ekonomi anggota jemaat, serta masyarakat lingkungan sekitar mereka yang mengalami dan merasakan kemiskinan itu. Jemaat

gereja harus didorong untuk hidup dalam kesederhanaan, sebagai wujud rasa solidaritas gereja kepada orang-orang miskin yang masih belum terentaskan di Indonesia.

Kesederhanaan itu berarti pula gereja melakukan kritik internal secara terus menerus terhadap berbagai aktivitas dan pelayanannya yang hanya menonjolkan kemeriahannya, namun tidak memiliki dampak kepada perubahan sikap dan sensitivitas jemaat kepada berbagai persoalan kemiskinan di masyarakat. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang sedemikian kompleks dan besar, maka gereja perlu secara proaktif dan rendah hati bersedia bekerja sama dengan umat beragama lainnya untuk menanggulangi kemiskinan. Ini penting agar kehadiran gereja menjunjung harkat dan martabat manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras. Inilah panggilan gereja yang utama.

Melalui kerja sama yang gereja lakukan, maka kehadiran gereja dapat memberi warna dan memberi makna bagi bersama. Pada saat yang sama, gereja perlu terus menerus menyuarakan kritik profetisnya tanpa pandang bulu terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya ketidakadilan, terampasnya hak-hak masyarakat, dan terhadap sistem yang menindas serta memiskinkan manusia. Spiritualitas dan religiusitas jemaat juga harus sampai kepada sebuah kesalehan sosial, dimana energi spiritual yang dimiliki jemaat mampu untuk mendorong kepeduliannya akan berbagai persoalan kehidupan masyarakat.

Spiritualitas seperti inilah yang harus menjadi perhatian gereja dalam membangun kehidupan jemaat. Salib harus dipahami sebagai refleksi atas penderitaan dan kematian Kristus, namun disaat yang sama pula harus mampu membuka mata dan telinga kita akan penderitaan, kesengsaraan, dan pengharapan manusia akan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Disitulah gereja berperan.

SIMPULAN

Peran gereja sebagai mandataris Kerajaan Allah perlu diaktualisasikan, sehingga "rasa" sebagai garam dan terang itu dapat tampak di tengah masyarakat. Pergumulan hidup masyarakat yang perlu diambil sebagai kajian dalam menetapkan praksis bergereja. Gereja perlu berperan aktif untuk dapat memberikan solusi bagi pergumulan masyarakat. Tidak hanya melakukan aksi sosial, yang tampak membantu sesaat, tetapi perlu usaha transformatif agar dapat memberikan jawaban yang tepat dalam usaha membantu masyarakat. Kemiskinan merupakan pergumulan masyarakat yang selalu menjadi pemikiran strategis nasional untuk diselesaikan. Senada dengan hal ini, tugas dan panggilan gereja adalah untuk menyuarakan ketidakadilan dan keberpihakan gereja kepada kaum yang tertindas.

Peningkatan spiritual di dalam jemaat perlu ditingkatkan, sampai jemaat mempunyai kesalehan sosial dan kepedulian sosial di tengah masyarakatnya. Kesalehan sosial inilah yang kemudian menjadi sebuah praksis bergereja, yang bukan hanya mempunyai spiritualitas kepada Tuhan, tetapi mampu merefleksikan spiritualitasnya kepada lingkungan masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat dapat merasakan Tuhan hadir pula di tengah pergumulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, 2013

Sayogyo, 1978

Darmawijaya. Keterlibatan Allah Terhadap Kaum Miskin, 1991